BANJAR ADAT BUKIT SARI



DESA SUMBERKLAMPOK
KECAMATAN GEROKGAK, BULELENG

RARIA

Tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Banjar Adat Bukit Sari adalah status kepemilikan lahan. Hingga saat ini setiap kepala keluarga belum mendapatkan kepastian hukum kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah. Namun disadari juga, ketika sertifikat sudah didapatkan ada kemungkinan akan terjadi alih kepemilikan lahan - seperti kondisi pada umumnya yang terjadi di Bali.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap kepala keluarga Banjar Adat Bukit Sari pada bulan April 2018 telah membuat Surat Pernyataan. Bahwa apabila pemerintah memberikan kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap KK tidak akan memindahtangankan/menjual kepada pihak lain, kecuali kepada keturunan/ahli waris sebagai pewaris yang sah.

PUSTA

pilang

The Samdhana Institute

BANJAR ADAT BUKIT SARI

Desa Sumberklampok
Kecamatan Gerokgak, Buleleng

Lembaga Pilang
The Samdhana Institute

BANJAR ADAT BUKIT SARI
Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng

Teks
Ni Made Indrawati
Atiek Kurnianingsih

Foto
Tim Pemetaan Banjar Adat Bukit Sari
Yayasan Wisnu

Edit dan Tata Letak
Atiek Kurnianingsih

Buku ini disusun berdasarkan hasil pemetaan spasial dan riset sosial budaya yang dilakukan secara partisipatif oleh Tim Pemetaan Banjar Adat Bukit Sari, bekerja sama dengan Lembaga Pilang dan pendampingan Yayasan Wisnu dengan dukungan pendanaan dari The Samdhana Institute.

Sumberklampok
2019

Pengantar

Masyarakat Banjar Adat Bukit Sari, adalah masyarakat eks pengungsi Transmigrasi Timor-Timur yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Buleleng di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sumberklampok, pada kelompok hutan Bali Barat (RTK.19). Secara administratif Banjar Adat Bukit Sari berkedudukan di Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Masyarakat eks pengungsi Transmigrasi Timor-Timur ditempatkan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sumberklampok sejak tahun 2000 sampai sekarang.

Buku ini menggambarkan dinamika masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di Timor-Timur, kemudian dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dari Timor-Timur ke Indonesia, ke Bali. Melalui perjalanan panjang, akhirnya bertempat tinggal dalam satu kawasan dan membentuk pranata bernama Banjar Adat Bukit Sari.

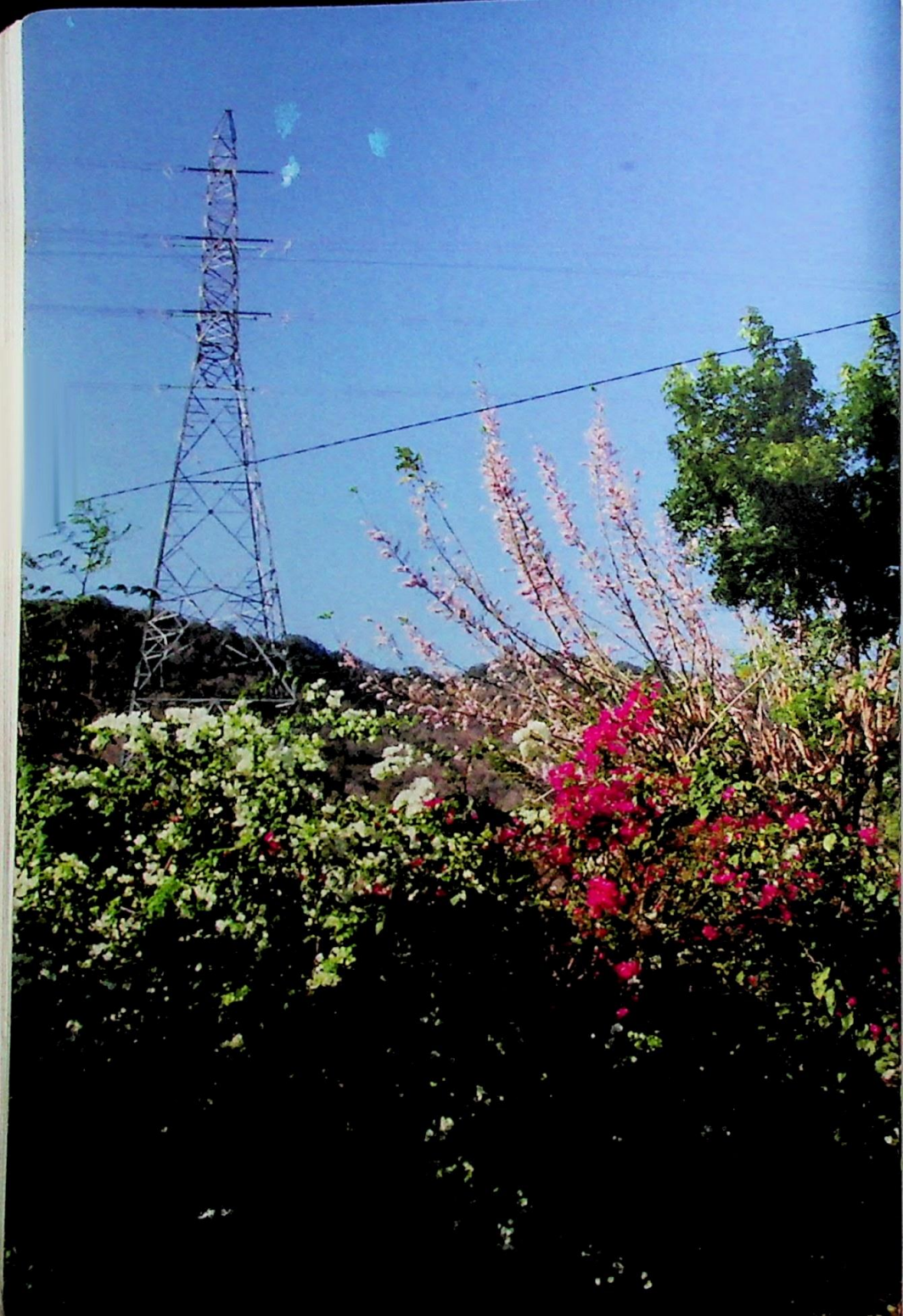
Buku ini juga merupakan laporan pemetaan dan kajian sosial ekonomi budaya (sosekbud) masyarakat Banjar Adat Bukit Sari. Selama 19 tahun masyarakat Banjar Adat Bukit Sari belum memiliki hak kepemilikan yang jelas atas lahan yang telah ditempati dan digarap. Dukungan atas penyelesaian konflik tenurial di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sumberklampok sangat diharapkan oleh masyarakat Banjar Adat Bukit Sari, agar mendapat hak kepemilikan atas lahan yang ditempati sebagai pemukiman dan lahan garapan sebagai sumber penghidupan utama.

Kami dari Lembaga Peduli Alam dan Lingkungan (PILANG) mengucapkan terima kasih kepada Kelian Banjar Adat Bukit Sari dan Tim Kerja Pengungi Eks. Tim-Tim Asal Bali yang telah memberikan data dan informasi, juga semua pihak yang terlibat. Khususnya kepada Yayasan Wisnu yang telah memfasilitasi penyusunan buku ini.

Sumberklampok, September 2019

Daftar Isi

Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Bukit Sari	1
Mencari Penghidupan di Timor Timur	2
Dari Timor Timur ke Sumberklampok	12
Potensi dan Sumber Daya Alam	26
Kewilayahan	26
Flora dan Fauna	28
Ketersediaan dan Pemenuhan Air Bersih	37
Sumber Energi	38
Sumber Daya Manusia	40
Kekayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	45
Kelembagaan Adat dan Agama	45
Aturan Adat	47
Kepercayaan	49
Sistem Kemasyarakatan	51
Pengobatan Tradisional	53
Kuliner Lokal	55
Pertanian Lahan Kering	57
Warung/Toko Kelontong dan Bengkel	58
Sabun Natural	59
Lembaga Keuangan	61
Infrastruktur dan Fasilitas Umum	63
Permukiman dan Bale Banjar	63
Sekolah/Lembaga Pendidikan dan Kesehatan	65
Jalan, Komunikasi, dan Listik	66
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair	69
Menghadapi Tantangan Kini dan Nanti	71



Bukit Sari

Saat ini, tahun 2019, Banjar Adat Bukit Sari dihuni oleh para petani eks transmigran Timor Timur (saat ini bernama Timor Leste), korban jajak pendapat di Timor Timur pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Masyarakat yang sejak tahun 2000 ditempatkan pada Kawasan Hutan Produksi (HPT) Desa Sumberkelampok berasal dari berbagai daerah di Bali, yaitu Buleleng (59 KK), Karangasem (46 KK), dan Badung (2 KK).

Para keluarga yang tinggal di Banjar Adat Bukit Sari, Desa Sumberklampok - Buleleng adalah eks transmigran Timor Timur yang ketika itu mengikuti Gelombang II dan V. Gelombang II dilaksanakan pada tahun 1985, dan Gelombang V tahun 1991.

Mencari Penghidupan di Timor Timur
(Kisah para eks transmigran Timor Timur)

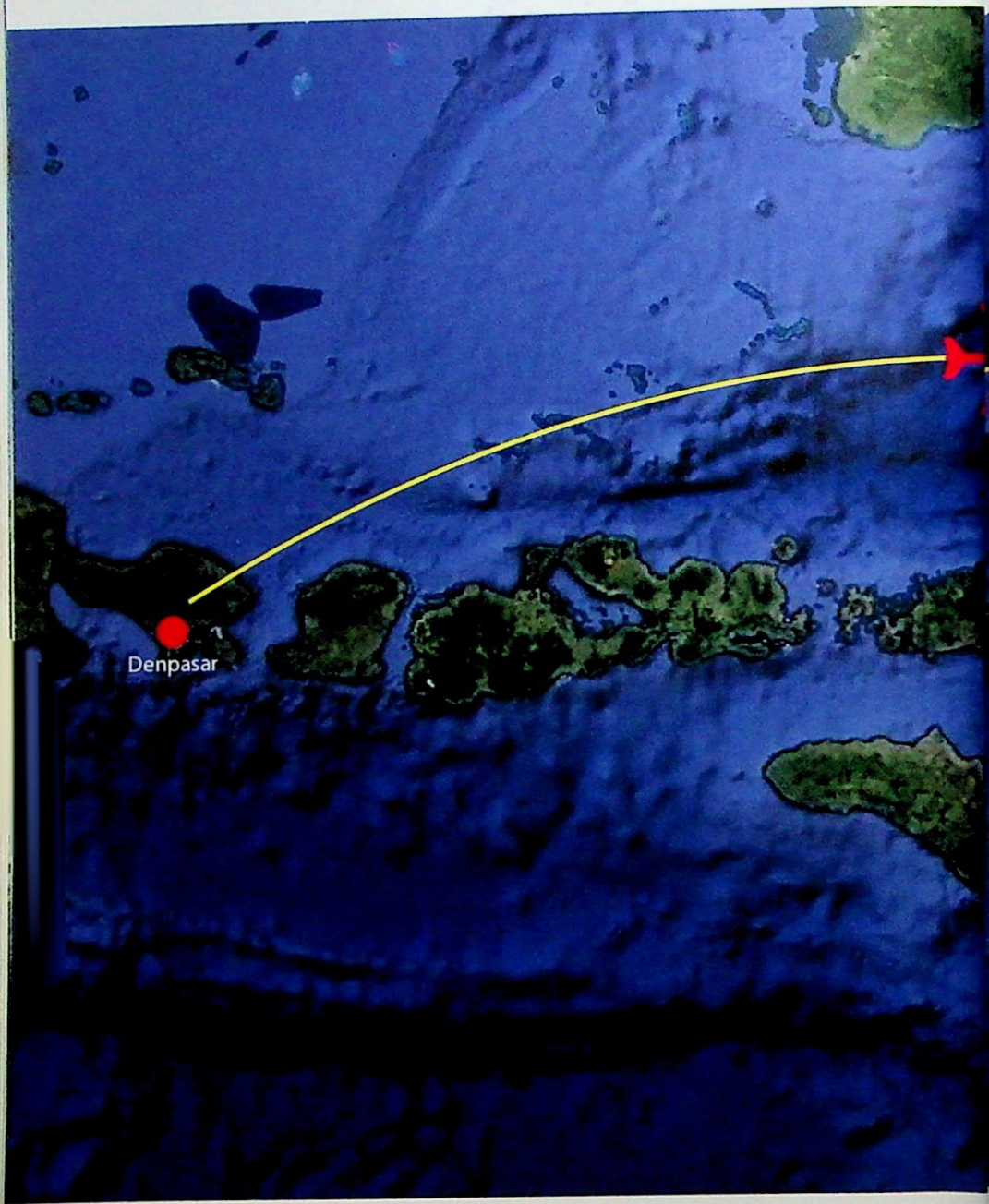
Persiapan untuk ke Timor Timur berlangsung cukup lama, yaitu selama satu tahun, sejak tahun 1984. Awalnya para calon transmigran dipersiapkan melalui Pelatihan Petani Teladan di Balatrans (Balai Besar Latihan Ketransmigrasian) – Sleman, Yogyakarta selama satu bulan. Peserta mendaftar atas inisiatif sendiri, karena alasan ingin mencari sumber penghidupan.

Ketika itu ada 30 orang peserta dari Bali yang berasal dari Tabanan, Negara, Badung, dan Buleleng yang mengikuti pelatihan. Kami dijanjikan akan diberangkatkan ke Timor Timur pada bulan Mei 1985. Ketika pelatihan di Balatrans, peserta sempat ke Jakarta selama tiga hari, dan pada tanggal 17 Agustus 1984 mengikuti upacara bendera Hari Kemerdekaan RI.

Setelah pulang dari Balatrans ke Bali, kami masih mengikuti beberapa kali pelatihan lagi di Denpasar. Hingga akhirnya kami mendapat kepastian berangkat ke Timor Timur pada tanggal 5 Mei 1985, dan tiba di Timor Timur tanggal 15 Mei 1985.


Selamat datang
PARA PESERTA LATIHAN PETANI TERAMPIL
DARI TIMOR - TIMUR
DI YOGYAKARTA




Denpasar


Atapu

Kami, eks transmigran Timor Timur Gelombang II merasakan perjalanan yang sangat panjang. Berangkat dari Denpasar naik pesawat Hercules, dan turun di Dili - Timor Timur. Barang bawaan kami diturunkan oleh tentara. Setibanya di Dili kami ditampung di Kantor Dwikora selama satu hari. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan ke Atapupu melewati jalur laut, bersamaan dengan Danramil (Komandan Rayon Militer) Kota Suai, Covalima.

Setelah beristirahat, dari Atapupu perjalanan berlanjut ke Desa Beco, desa tujuan kami. Ketika itu hanya ada jalan setapak, belum ada jalan mobil. Kami ke Desa Beco naik truk yang berjalan di belakang traktor pembuka jalan, selama dua hari satu malam (saat ini, setelah jalan dibuka hanya butuh waktu empat jam), dalam situasi darurat militer. Desa Beco terletak di Kampung Mocola, Kecamatan Suai, Kabupaten Covalima.





Fasilitas yang kami dapatkan adalah pekarangan dan bangunan rumah kayu. Selain itu juga mendapatkan lahan garapan seluas 25 are yang sudah dibuka, dan seluas satu hektar yang kami buka sendiri. Selama satu tahun, semua kebutuhan, termasuk kebutuhan pertanian ditanggung oleh pemerintah. Rata-rata kemapanan baru bisa kami capai pada tahun kelima.

Kehidupan di Timor Timur pada tahun 1985 sangat mencekam karena dalam kondisi darurat militer. Ketika akan bepergian untuk keluar kampung harus membawa surat jalan, hingga tahun 1987. Setelah tahun itu, perjalanan keluar kampung tidak lagi membutuhkan surat jalan, namun tetap dilakukan pemeriksaan di tiap pos jaga.

Sebagai orang Bali dan beragama Hindu, kami tetap menjalankan ritual yang biasa kami lakukan. Ritual dengan kelengkapan aneka jenis keanekaragaman hayati. Kami kadang harus mencarinya ke kebun-kebun yang sudah ditinggalkan oleh orang lokal, masyarakat asli Timor Timur. Maka untuk bisa mendapatkan kelengkapan upacara tersebut, kami harus diantar oleh para petugas jaga dengan alasan keamanan.







Sementara kami, eks transmigran Timor Timur Gelombang V mengalami perjalanan dan kondisi yang lebih baik dibanding Gelombang II. Desa tujuan eks transmigran Timor Timur Gelombang V adalah Remea yang terletak di dekat Desa Beco. Saat kami tiba, perjalanan darat menuju Beco dan Remea sudah menggunakan bus.

Saat itu, hanya Timor Timur yang dibuka untuk transmigrasi. Lokasi transmigrasi juga dekat kota dengan akses yang mudah. Ketika itu, bekal yang kami bawa adalah Rp 60.000,00 kira-kira sebanding dengan Rp 1.000.000,00 untuk saat ini.

Kondisi saat itu sudah lebih aman dibanding tahun 1985. Sama seperti para transmigran Gelombang II, kami juga menerima bantuan dari pemerintah selama satu tahun. Jika dalam satu tahun belum menghasilkan, bantuan bisa diperpanjang untuk waktu enam bulan. Kami mendapatkan lahan seluas satu hektar, juga lahan pekarangan dan rumah. Lahan seluas 25 are sudah dibuka dan ditraktor oleh pemerintah, sisanya dibuka sendiri, bisa dijadikan kebun atau sawah.

Rata-rata kami sudah menghasilkan/mapan pada tahun kedua. Dalam satu tahun rata-rata menghasilkan 18 karung gabah dari 35 are luasan lahan sawah. Kami membuat sendiri saluran irigasi untuk pengairan sawah. Sistem subak juga kami jalankan, khusus untuk para transmigran yang berasal dari Bali.

Dari Timor Timur ke Sumberklampok

Selama tinggal di Timor Timur, kami tinggal berdampingan dengan warga asli Timor Timur, juga transmigran dari daerah lain di Indonesia. Kemudian, tahun 1999, terjadilah krisis Timor Timur. Pada masa genting tersebut kami selalu diamankan dan dilindungi oleh Persatuan MAHIDI (Mati Hidup Demi Indonesia), juga kelompok lainnya yang pro Indonesia. Perekonomian saat itu menjadi lumpuh.

Ada dua opsi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Timor Timur, yaitu berintegrasi dengan Pemerintah Indonesia atau merdeka. Hal tersebut menjadi bahan pembicaraan dan pusat perhatian bagi seluruh masyarakat Timor Timur, terlebih warga transmigrasi. Rasa khawatir selalu menghantui benak kami, para transmigran.

Sebelum jajak pendapat, para perempuan dan anak sudah pulang lebih dulu ke Bali. Karena ketika itu di antara kami banyak yang berpikir, sangat kecil kemungkinan untuk mencapai kemenangan pro Indonesia. Jajak pendapat pun kemudian dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1999.

Pemungutan suara berlangsung di seluruh pelosok Timor Timur, dan hasilnya diumumkan dalam waktu yang sangat singkat, empat hari setelah pemungutan suara, yaitu pada tanggal 4 September 1999. Dengan adanya hasil jajak pendapat tersebut, akhirnya kekhawatiran dan rasa was-was kami terjawab, bahwa perolehan suara dimenangkan oleh pihak pro kemerdekaan.

Berarti, orang-orang pro Indonesia akan kehilangan tempat, terlebih kami warga transmigrasi yang sudah dianggap sebagai penduduk pendatang. Dan setelah jajak pendapat, semua transmigran diwajibkan pulang ke daerah asalnya masing-masing. Termasuk kami, harus pulang ke Bali, ke daerah asal di mana sudah tidak ada lagi tanah yang kami miliki.

Ironisnya, semua eks transmigran membawa tiga sertifikat dari Timor Timur, yaitu sertifikat rumah/pekarangan, sawah, dan lahan kering. Namun sampai di Bali ketiga sertifikat yang kami miliki sudah tidak lagi bernilai.

Sepulang dari Timor Timur, selama tujuh hari kami tinggal di Gedung Kesenian Singaraja. Saat itu ada sekitar 323 KK yang berasal dari Buleleng tinggal di sana. Setelah satu minggu, ada himbauan dari Bupati Buleleng ke semua camat yang memiliki Pengungsi Tim Tim untuk menjemput warganya. Setiap camat kemudian meneruskan himbauan kepada setiap kepala desa yang memiliki warga Pengungsi Tim Tim untuk menjemput di Gedung Kesenian Singaraja, kembali ke desa.

Dari sekitar 323 KK tersebut, 23 KK di antaranya tidak mau dipulangkan ke desa. Kami, para Pengungsi Tim Tim yang saat ini tinggal di Banjar Adat Bukit Sari, memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halaman karena sudah tidak lagi memiliki rumah dan lahan pertanian di tempat asal.

Ketika itu, untuk ke-23 KK yang tidak mau pulang ke kampung halaman, ada tiga opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah mengikuti program transmigrasi ke Riau, opsi kedua adalah ,kembali ke Timor Timur (yang kemudian menjadi Timor Leste), dan opsi ketiga adalah menerima uang sekitar 5,9 juta rupiah.

Jawaban atas tiga pilihan tersebut tidak dapat langsung kami berikan, sehingga kami dipindahkan dan tinggal sementara selama satu tahun di Transito Transmigrasi di Singaraja. Saat di Transito Transmigrasi kami mendapatkan uang lauk-pauk sebanyak Rp 150.000 per bulan. Setiap minggu ada perwakilan yang datang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yang saat itu dijabat oleh Bapak Wirata Sindu, melakukan *lobby* karena tidak mau memilih dari tiga opsi yang ditawarkan.

Ratusan Pengungsi Timtim Asal Buleleng Unjuk Rasa

* Tuntut Janji Wirata Sindhu

Singaraja (Bali Post) -

Ratusan warga pengungsi Timtim asal Buleleng, Kamis (20/4) turun ke jalan berunjuk rasa memperjuangkan nasibnya. Mereka beramai-ramai menyerbu Wantilan Praja Winangun Buleleng, tempat dilaksanakannya sidang DPRD setempat. Akibatnya sidang sempat buyar karena para pengungsi tidak mau mengulur waktu untuk bertemu dan menagih janji Bupati Wirata Sindhu.

Koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa I Nengah Kisid mengemukakan, mereka turun menagih janji Bupati Buleleng Wirata Sindhu, di mana akan memanusiakan pengungsi. Di samping nasib masih terkatung-katung, juga sangat disayangkan ulah petugas yang "menyunat" jatah beras maupun uang lauk-pauk yang seharusnya diterima.

Kedatangan mereka ke wantilan, setelah tak berhasil dijumpai di kantor bupati, pada bekas gedung Diparda kompleks Sasana Budaya Singaraja. Setelah diberitahu bupati menghadiri sidang di DPRD, mereka dengan penuh emosional mendatangi gedung lembaga legislatif yang tinggal onggokan puing-puing. Di tempat ini pun mereka diberitahu anggota Satpol PP bahwa sidang Dewan di wantilan.

Merasa dipermainkan petugas, mereka tambah beringas dengan cemohan yang tak patut dikeluarkan dan bertekad menduduki ruang sidang para wakil rakyat itu. Asisten I Sekda Buleleng Drs. Gusti Gede Wardika didampingi Kabag Humas Drs. Ketut Budiana yang diperintahkan bupati melakukan negosiasi agar warga pengungsi itu bersabar hingga persidangan usai, tak bisa berbuat apa-apa. Kedua pejabat teras Pemda Buleleng yang berdiri di antara pintu besi *paduraksa* kantor bupati didobrak dan dibuka paksa. Sementara anggota Satpol PP hanya tampak menonton massa pengungsi Timtim itu berlalu dari arah barat maupun timur menuju wantilan. Satu regu Dalmas Polres Buleleng tiba setelah massa pengungsi itu menduduki wantilan sehingga persidangan yang mengagendakan penyampaian pemandangan anggota Dewan atas RAPBD 2000 itu spontan buyar mengperhatikan kedatangan massa pengungsi tersebut.

Ketua Dewan Drs. Nyoman Sudharmaja Duniaji, MBA didampingi para wakil ketua serta bupati di meja pimpinan meminta perhatian dan pengertian massa pengungsi Timtim untuk bersabar sekaligus bisa mengikuti persidangan. Saat itu anggota Dewan dari Komisi A IGN Agung Darmada mulai menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD 2000 juga terhenti. Kegaduhan tak terkendalikan sehingga ketua Dewan menghentikan persidangan. Kemudian bupati didampingi pimpinan Dewan menjumpai massa pengungsi untuk mengetahui keinginannya.

Mereka yang seolah-olah sudah terpatri dengan mosi tak percaya kepada pemerintah itu tidak memberi kesempatan Bupati Wirata Sindhu memberikan penjelasan. "Kami sudah kenyang di balik perut kelaparan dengan janji-janji, sebab segala sesuatu yang sudah disepakati di Jakarta tak ada diwujudnyatakan," ujar mereka dan belum lagi adanya "penyunatan" jatah beras yang semestinya 40 gram/jiwa/hari termasuk uang lauk-pauk Rp 1.500/jiwa/hari.

Selain jatah dikurangi, tambah Made Sumenasa, mulai April ini tidak ada lagi pembagian. Ketidakadilan dalam memberikan penanganan warga pengungsi Timtim juga diungkapkan, seperti anggota TNI/Polri dan PNS yang sudah dipekerjakan — sementara mereka tak tentu nasibnya setelah kehilangan kekayaan yang digali dari bumi Lorosae selama puluhan tahun.

Masih trauma dengan kondisi Timtim, mereka menolak tawaran pemerintah untuk ditransmigrasikan ke Pulau Burung. "Kami tetap mau tinggal di Bali karena pemerintah pusat sudah memberikan peluang dan tidak keberatan sepanjang ada tanah negara seperti disampaikan Mendagri ketika bertemu di Jakarta," tegasnya melatarbelakangi keinginan bertemu langsung dengan gubernur.

Baik bupati maupun ketua Dewan akan mengecek dan menyelidiki dugaan adanya penyunatan terhadap jatah beras maupun uang lauk-pauk yang selama ini ditangani Kandepsos bersama PMI Buleleng.

Sudharmaja Duniaji bersama Bupati Wirata Sindhu yang saat itu dikelilingi massa pengungsi — sementara anggota Dewan lainnya menjaga jarak berusaha meredam emosi warganya yang sebagian dari mereka masih menempati Asrama Transito di Pemaron.

Selaku wakil rakyat, dia berjanji akan bertemu dengan Gubernur Bali menyampaikan keinginan massa pengungsi agar bisa bertatap muka. Apa pun hasil pertemuan dengan gubernur, kata dia, akan disampaikan pada kesempatan pertama kembali dari Denpasar. Penyerahan itu sedikit melegakan massa pengungsi dan meninggalkan wantilan di antara bekas gedung terbakar siang itu. Sidang paripurna DPRD pun dilanjutkan kembali mendengarkan pemandangan anggota Dewan.

(003)

Keputusan untuk ke Sumberklampok merupakan hasil negosiasi melalui advokasi Bapak Wayan Sudirta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng selama satu tahun. Advokasi dilakukan juga ke Jakarta, ketika itu ada 17 orang didampingi Bapak Wayan Sudirta menghadap Kementerian Sosial RI.

Masukan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI adalah kalau Bali mempunyai lahan, silakan diberikan. Dan jawaban Gubernur Bali yang ketika itu dijabat oleh Bapak Dewa Brata adalah akan memberikan tanah produktif kepada para eks transmigran Timor Timur, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pengungsi Tim Tim.

Namun setelah kembali dari Jakarta, Bapak Dewa Brata mengatakan Pemerintah Bali tidak mempunyai tanah produktif. Gubernur Bali kemudian memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk menangani pengungsinya masing-masing. Pengungsi Buleleng paling banyak dibanding kabupaten lainnya, sehingga Pemda Kabupaten Buleleng hanya bisa mengganti Rp 5.900.000,00 untuk setiap kepala keluarga atau bantuan perumahan tipe 36 dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial).

Balada Eks Transmigran



Keluarga eks transmigran Timtim asal Bali menunggu janji.

PROGRAM transmigrasi adalah sebuah kebijakan. Disebut kebijakan karena program ini merupakan jalan keluar mengatasi masalah, terutama menyangkut problem kependudukan. Sisi positif lain yang menyertai program tersebut adalah ingin memperkuat integrasi bangsa dengan menciptakan keanekaragaman suku, etnis, dan agama di suatu daerah.

Dalam perkembangan kemudian, program ini menguntungkan masalah. Konflik akibat kecemburuan penduduk setempat atas keberhasilan para transmigran, meledak di hampir semua daerah tujuan transmigrasi.

Masalah paling serius yang menimpa para pahlawan kependudukan ini adalah yang dialami eks transmigran Timtim, termasuk yang berasal dari Bali. Dikatakan serius karena mereka bukan korban konflik sosial, melainkan tumbal kebijakan politik.

Aniknya, khusus untuk eks transmigran Timtim asal Bali, masalah itu malah kian pelik justru ketika mereka sudah tiba di tanah asalnya, Pulau Dewata.

Mengapa? Karena mereka memahami "hak" dan mengerti bahwa dirinya menjadi korban dari kebijakan kependudukan yang dipaksakan.

Kesadaran dan pengertian demikian memunculkan aksi: mereka menuntut ganti rugi kepada pemerintah, cq Pemda Bali. Dasar pemikirannya sederhana, bahwa segala kerugian yang diderita itu akibat kebijakan politik pemerintah yang tidak antisipatif.

Sebelum tuntutan itu terjawab secara penuh, lagi-lagi muncul masalah baru yang boleh jadi merupakan titik balik dari rangkaian masalah yang menyertai mereka.

Pada saat tim kuasa hukum para eks transmigran Timtim asal Bali ini bekerja keras memperbaiki nasib kliennya, isu pungli dana bantuan pun mengemuka. Isu itu langsung menyasar pihak-pihak yang berhubungan dengan para musafir alias pendatang di tanah kelahiran sendiri ini. Tim kuasa hukum tak terlepas dari tudingan itu.

Tentu saja, isu itu mengundang perhatian publik. Sebab, yang namanya uang, apalagi yang sudah menjadi hak kaum susah, selalu sensitif di telinga masyarakat.

Dengan demikian—tanpa pretensi apa pun, MQ-DUS mangangkat itu sebagai materi berita yang bisa Anda baca pada edisi 45 ini.

Meski banyak pihak—termasuk kuasa hukum para eks transmigran dan oknum aparat pemerintah—menjadi sasaran isu tak sedap itu, kami yakin pembaca tentu punya daya seleksi yang sudah terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan.

Bahwa pungli, korupsi, penyimpangan, dan apa pun namanya, sudah identik dengan kekuasaan. Bila benar hak para eks transmigran itu dikorup, maka salegisme di atas segera menuntun kita untuk menemukan jawabannya: rakyat kecil selalu yang terinjak. ●

DENPOST
MEMBEDAH JANTUNG DAN KEGELAPAN KOTA
Kamis, 26 September 2002 - Nomor 1.167 Tahun ke - 3
Eceran Rp 1.000

Sewaktu di Timtim, Mantan Transmigran Itu Hidup Makmur

AKSI pemuskan oleh mantan transmigran Timtim di kantor Badan Kependudukan Daerah (Bakda) Propinsi Bali, Senin (23/9) lalu, dimaklumi oleh Kepala Bakda Drs. Tjok Gede Putra yang dihubungi Selasa (24/9) lalu. Namun ia menyayangkan warga tidak mampu mengendalikan emosi dan membicarakan permasalahannya dengan kepala dinas.

Putra menjelaskan warga itu sebenarnya sering bertemu dan mengunjungi kantor Bakda dan sikap mereka selama ini sangat baik. Pihak Bakda juga sering mengunjungi warga sewaktu masih di Timtim. Bahkan "warga sangat berterimakasih karena sudah diklaim ke Timtim sebagai transmigran sehingga penghidupan mereka sangat makmur. "Sewaktu mengunjungi mereka di Timtim, saya melihat kondisi mil mereka cukup makmur. Banyak warga memiliki mobil antara 4-6 buah. Rumah pemberian berukuran 4 m X 6 m yang mereka tempati sebagai transmigran mampu dan telah jadi rumah permanen dan dilengkapi antena parabola. Siswah mereka luas, bahkan beberapa warga mengaku anaknya dikirim ke Bali untuk sekolah dan kuliah. Pokoknya kehidupan mereka di sana benar-benar makmur," tegasnya.

Putra mengaku prihatin dengan keadaan mantan transmigran di Sumber Kelampok. Namun dia tidak mengerti kenapa warga bersikeras menempati kawasan penyangga hutan lindung di Sumber Kelampok, padahal lahan tersebut sangat kering, tanahnya tandus dan susah mendapat air jernih. Ia juga mengaku heran kenapa warga menolak bantuan kompensasi yang dikucurkan Pemkab Buleleng dan Pemprop Bali padahal jumlahnya cukup untuk memulai usaha baru. "Saya pribadi menaksirkan mereka cross karena kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun di Timtim tertinggal begitu saja. Mudah-mudahan warga dan pemerintah bisa kompromi sehingga masalah tersebut cepat terselesaikan," harapnya.

Dia menjelaskan, proses legalitas lahan yang ditempati warga saat ini sebenarnya sudah dilakukan Pemprop sejak setahun lalu, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Pantauan DenPost di Kantor Bakda, mobil yang dirusak sudah dipindahkan ke tempat parkir di belakang kantor. Bagian yang rusak ditutupi dengan terpal seizin pihak kepolisian. Pot hancur dan tanaman yang dicabut juga sudah diberesihkan. Aktivitas di kantor setempat berjalan seperti biasa. (tit)

Pada bulan September tahun 2000, Pengungsi Timtim masuk ke Sumberklampok, ditempatkan di Balai Banjar Sumberbatok selama sekitar dua bulan. Setelah itu pindah ke kawasan hutan produksi terbatas (HPT) RTK.19 wilayah Desa Sumberklampok. Kami mulai membersihkan lahan dan membangun gubuk/rumah dari daun kelapa dan kayu, hasil pembersihan semak belukar.

Lain dari itu, ada 104 KK yang saat penjemputan dengan terpaksa mau dipulangkan. Namun setibanya di desa harus menumpang dengan keluarga karena sudah tidak ada lagi rumah dan lahan pertanian yang dimiliki. Atas dasar itulah akhirnya ke-104 KK tersebut kembali bergabung dengan kami 23 KK, ikut tinggal di Desa Sumberklampok.

Kami, ber-127 KK berjuang bersama membangun tempat penghidupan yang baru. Namun seiring berjalanya waktu, sebanyak 20 KK merasa tidak kuat tinggal di Desa Sumberklampok karena kondisi yang panas, kering, angin, dan tanah berbatu. Akhirnya ke-20 KK tersebut memutuskan untuk pulang ke desanya masing-masing, sehingga total jumlah keluarga yang ada di Banjar Adat Bukit Sari adalah 107 KK.





Tahun 2002, kami mulai bertani sambil membangun rumah dengan bantuan ramuan rumah (bahan bangunan) dari pemerintah. Penggarapan lahan pertanian dilakukan dengan sistem tadah hujan. Tanah di Sumberklampok cukup subur, tetapi lebih subur tanah di Timor Timur karena di sana air mengalir sepanjang tahun.

Karena kami menempati lahan kawasan HPT, pemerintah masih tetap memberikan penawaran. Supaya kami mau keluar dari kawasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang waktu itu dijabat oleh Bapak Sukarma, memberikan tawaran pengganti Rp 17.000.000,00 agar keluar dari kawasan hutan. Jumlah tersebut merupakan pengganti lahan pertanian dan ramuan perumahan.

Tawaran dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kami tolak. Penolakan kami sampaikan dengan cara berunjuk rasa. Selain karena penolakan pada tawaran tersebut, unjuk rasa juga kami lakukan atas dasar penghentian bantuan ramuan rumah. Unjuk rasa kami lakukan dengan cara menutup jalan menggunakan *sekepat* (balai bengong). Sebelum unjuk rasa kami lakukan, kami sempat bernegosiasi dengan Bapak Kepala Badan Kependudukan Provinsi Bali, tetapi tidak ada jalan keluar dan tidak memberikan keputusan.

Saat proses aksi sedang dilakukan, akhirnya Bapak Bupati Bagiada turun ke lokasi aksi, mengambil alih tugas Dinas Kependudukan. Bapak Bupati berembug dengan perwakilan Pengungsi Timtim, sampai akhirnya membuat dan menantangani Surat Pernyataan tertanggal 24-09-2002. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa "permasalahan yang sedang dihadapi oleh Eks Trans Tim Tim yang bertempat tinggal di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sepenuhnya akan diperjuangkan oleh Bupati Buleleng"

Ada dua hal yang akan diperjuangkan oleh Bupati Buleleng, yaitu bantuan ramuan bahan perumahan yang ketika itu ditangani oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali kepada Eks Trans Tim Tim yang tersendat-sendat diselesaikan dalam bulan Oktober untuk 59 KK sebagai tahap penyelesaian. Hal kedua adalah memperjuangkan status tanah/pemilikan hak.

Hingga saat ini, baru hal pertama yaitu bantuan ramuan bahan perumahan yang bisa diperjuangkan oleh Bupati Buleleng. Namun untuk hal kedua, yaitu status tanah/pemilikan hak belum didapatkan oleh para Pengungsi Tim Tim, atau secara formal dinamakan Masyarakat Eks Trans Tim Tim.

114°29'0"E

8°10'30"S

8°11'0"S

114°29'0"E

Sources: Esri, DigitalGlobe, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community



PETA WILAYAH

BANJAR ADAT BUKIT SARI EKS.TIMTIM
DESA SUMBERKLAMPOK, KEC. GEROKGAK
KAB. BULELENG - PROV. BALI

N
W E
S

0 0.05 0.1 0.2 0.3 Km

SKALA 1:6,500

Legenda

- Banjar / Pura Banjar
- Kantor Banjar Dinas Tegal Bunder
- Kantor Perbekel Sumberklampok
- Kantor TNBB
- MIS Ainul Yaqin
- Masjid Ainul Yaqin
- Pelaba Banjar
- Pelaba Banjar 2
- Pura / Pelaba Subak
- SD Negeri 1 Sumberklampok
- SD Negeri 2 Sumberklampok
- SMP Negeri Satu Atap 1 Gerokgak
- Jalan Produksi
- Batas Wilayah Bukit Sari

LUAS WILAYAH : 83.01 HA

pilang

The Samdhana Institute

Potensi dan Sumber Daya Alam

Kewilayahan

Banjar Adat Bukit Sari merupakan bagian Desa Adat Sumberklampok. Banjar adat ini terletak di Dusun/Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Batas wilayah Banjar Adat Bukit Sari di sebelah barat, dimulai dari *pangkung*/sungai musiman perbatasan dengan Hutan Produksi Terbatas, ke arah selatan mengikuti aliran sungai sampai di lahan milik Nyoman Cenara yang berbatasan dengan lahan HPT, berbelok ke timur mengikuti lahan Ketut Sukertia dan kapling selanjutnya sampai lahan miik Nyoman Arka yang berbatasan dengan lahan HKM, selanjutnya ke utara mengikuti semak-semak batas HKM sampai di SMPN Satu Atap 1 Gerokgak, kemudian ke barat mengikuti batas lahan pekarangan Pathor sampai di lahan pekarangan Made Poglag, kemudian ke utara sampai bertemu jalan raya, selanjutnya ke barat mengikuti jalan raya Singaraja – Gilimanuk sampai bertemu *pangkung*/sungai musiman sebagai titik awal.

Kewilayahan Desa Sumberklampok terdiri dari:

Desa Dinas/ Desa Adat	Banjar Dinas	Banjar Adat
Sumberklampok	Tegal Bunder	-
		Bukit Sari
	Sumberklampok	Sumberklampok
	Sumberbatok	Sumberbatok
		Teluk Trima

Ada dua opsi kerangka penempatan eks transmigran Timor Timur, yaitu 1) ditempatkan di lahan eks HGU PT. Dharma Jati Utama dan eks HGU No. 2 dan 3 PT. Margarana; dan 2) ditempatkan di lahan kawasan hutan produksi terbatas RTK.19. Pada akhirnya eks transmigran Timor Timur ditempatkan di lahan kawasan hutan produksi terbatas - yang saat ini bernama Banjar Adat Bukit Sari - atas persetujuan Pemerintah Provinsi Bali. Namun, hingga saat ini belum ada kepemilikan yang sah terhadap lahan yang ditempati tersebut sejak tahun 2000.

Dalam kerangka penyelesaian status kepemilikan lahan eks transmigran Timor Timur, masyarakat Banjar Adat Bukit Sari mengajukan permohonan pendampingan pada Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali. KPA Wilayah Bali kemudian memfasilitasi pembentukan Tim Kerja Pengungsi eks Timor Timur Asal Bali. Tim inilah yang kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan subjek dan objek reforma agraria yang hingga saat ini masih berlangsung.

Flora dan Fauna

Ada banyak potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Banjar Adat Bukit Sari, di antaranya yang berupa aneka jenis tumbuhan/ tanaman dan hewan.



Sumber pangan:

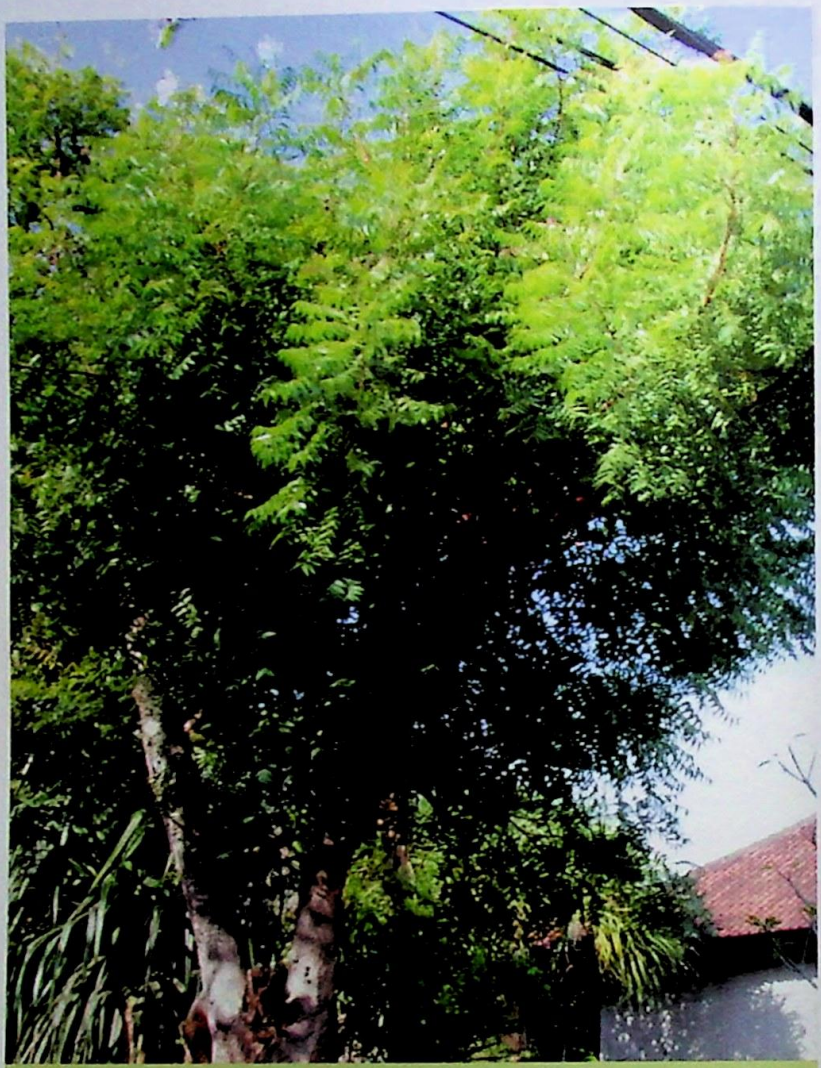
- Jagung, singkong
- Undis, kacang tanah, komak
- Terong, lanjar, buangit, bayam, kelor, labu cina



Tanaman upacara dan obat:

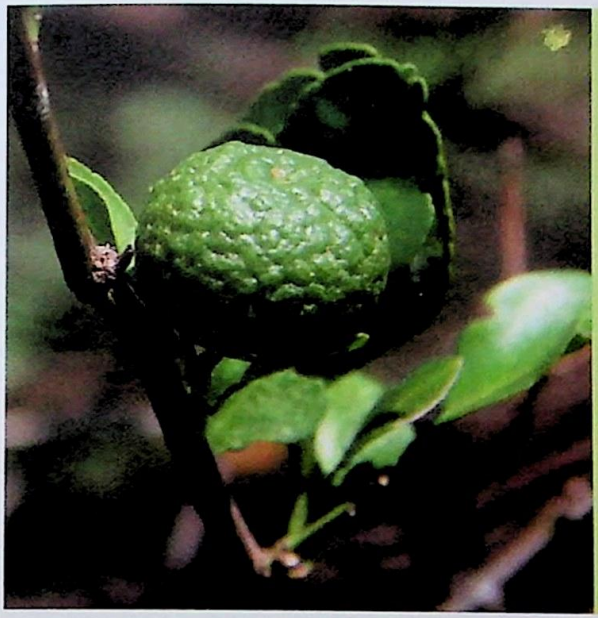
- Aneka jenis bunga (kembang kertas, kamboja, pacar cina, gemitir, soka, alamanda, telang, pucuk)
- Pudak, plawa, pandan harum
- Kelapa (gading, hibrida, hijau, kelapa salak)
- Pisang (raja, mas, susu, kepok, dangsaba)
- Tebu, sirih





Pohon untuk bangunan/infrastruktur dan pakan ternak:

- Gamelina, intaran, gempinis/mindi, talok/kersen
- Turi, bambu petung
- Sengon, lamtoro, gamal, turi



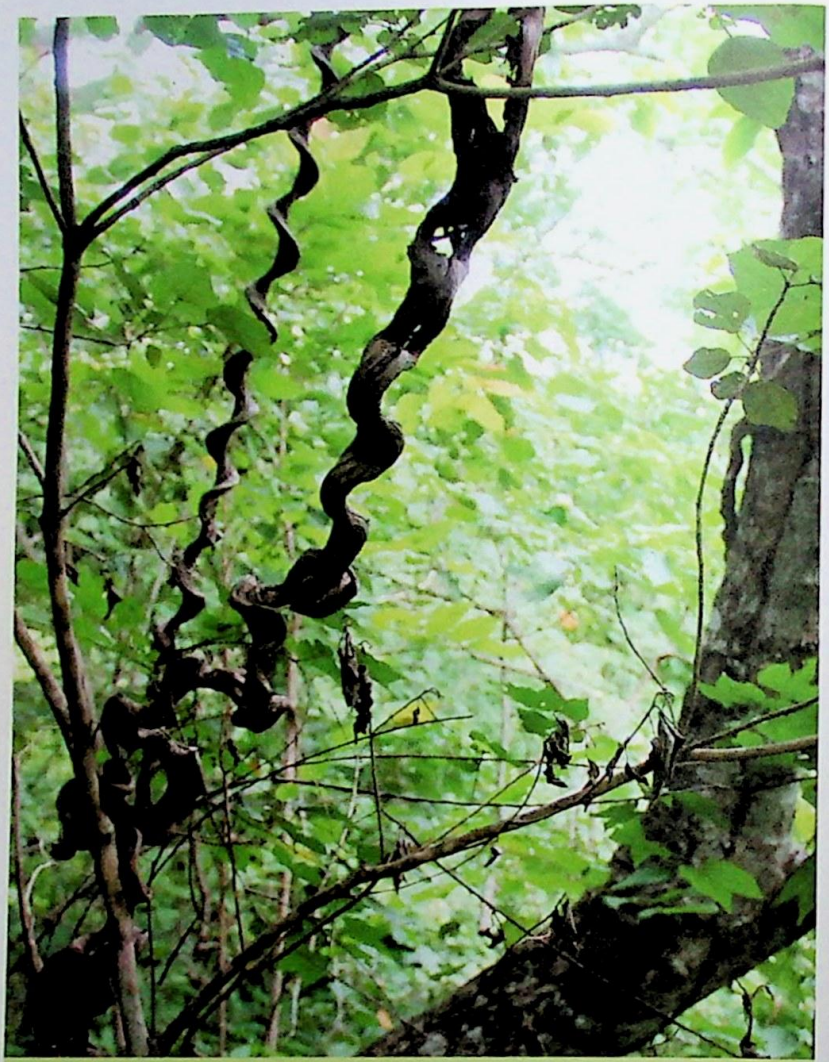
Rempah-rempah dan bumbu:

- Cabai
- *Tabia bun*
- Kunyit
- Kencur
- *Isen*
- Jahe
- Bawang merah
- Sere
- Jeruk lemo



Aneka buah-buahan:

- Mangga (arum manis, madu, manalagi)
- Jambu air
- Buah naga
- Belimbing wuluh
- Jeruk buah dan nipis

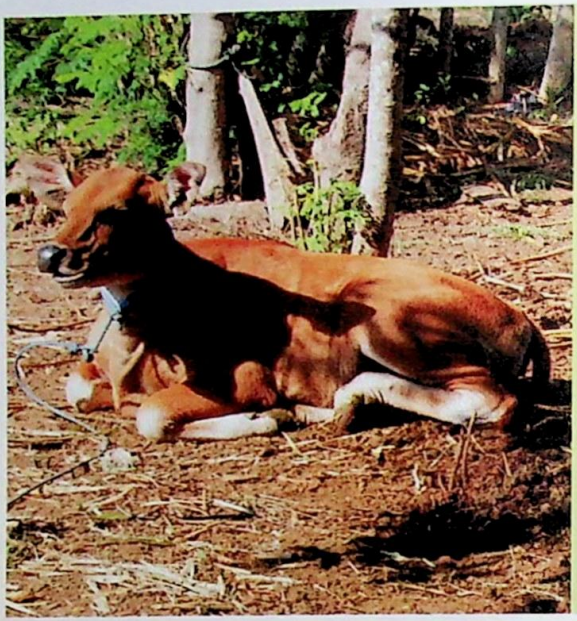


Tumbuhan liar yang tumbuh di perbatasan kawasan hutan dan pinggir jalan:

- Pohon *bun* yamg biasa digunakan untuk bahan kerajinan
- Pohon *ketket* digunakan sebagai pagar pembatas kebun dan hutan
- Bunga *medori* sebagai salah satu kelengkapan upacara *ngaben*

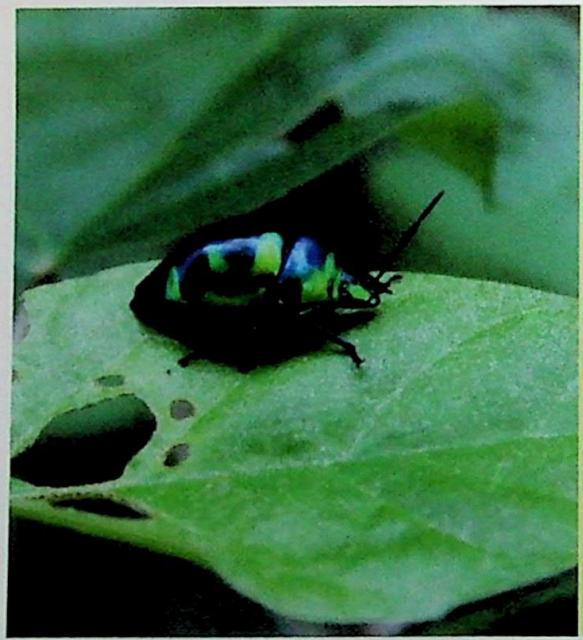






Hewan ternak dan peliharaan:

- Sapi
- Babi
- Ayam
- Bebek
- Mentok
- Lebah
- Anjing
- Kucing



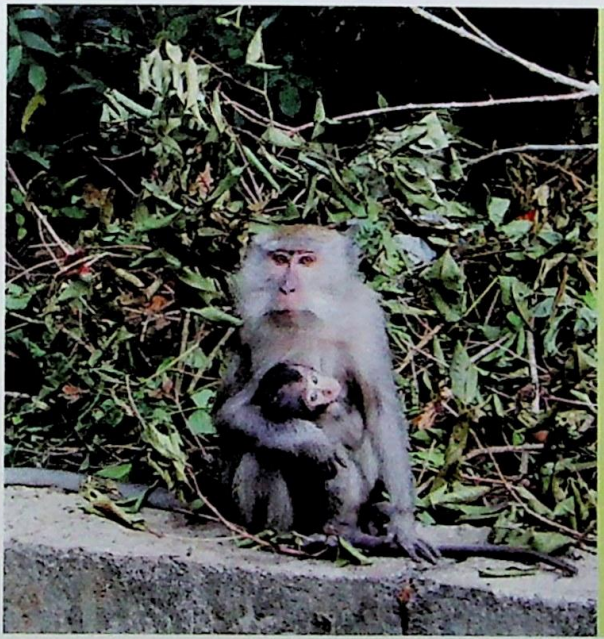
Hewan kecil:

- Laba-laba
- Capung
- Kupu-kupu
- Walang
- Kepik
- Ulat
- *Ngit*
- Lalat
- Nyamuk



Burung:

- Merpati
- Cerukcuk
- Kutilang emas
- Jalak hitam
- Perkutut
- Titiran
- *Cendet*
- Elang



Binatang liar:

- Kera
- Menjangan
- Babi hutan
- Ayam hutan
- *Alu*/biawak
- Ular (piton, kobra, hijau)
- Kelelawar/ *kalong*
- Kucing hutan





Ketersediaan dan Pemenuhan Air Bersih

Ada beberapa sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Banjar Adat Bukit Sari, yaitu:

- Air Sanggalangit yang berasal dari Desa Sanggalangit untuk pemenuhan air minum
- Sumur bor dan sumur gali untuk kebutuhan MCK, menyiram tanaman, dan minum ternak. Air sumur yang ada mengandung air kapur, sehingga tidak digunakan untuk air minum. Ada tujuh sumur bor dan enam sumur gali yang dimiliki oleh masyarakat Banjar Adat Bukit Sari. Air dari sumur bor ditampung pada bak penampungan, terutama ketika musim kemarau. Bak penampungan yang sama juga digunakan untuk menampung air hujan di musim penghujan.
- Satu sumur bor yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sumberklampok, terletak di Banjar Adat Sumberbatok, lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan MCK.

Sumber Energi

Ada tiga jenis sumber energi berbeda yang digunakan masyarakat Banjar Adat Bukit Sari, yaitu:

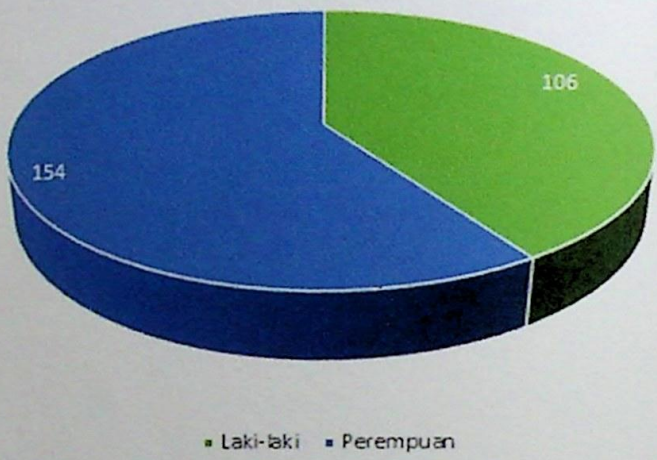
- Penerangan (sumber listrik) menggunakan PLN
- Memasak menggunakan gas dan kayu bakar yang kayunya diambil dari kebun. Salah satu jenis kayu yang biasa digunakan untuk kayu bakar adalah sengon/albesia
- Transportasi menggunakan bensin premium

Namun pada dasarnya Banjar Adat Bukit Sari dan Desa Sumberklampok pada umumnya memiliki sumber energi terbarukan sangat besar yang belum dikelola, yaitu matahari dan angin. Hembusan angin kencang menjadikan daun pohon pisang di Banjar Adat Bukit Sari sobek-sobek dan tidak ada yang utuh. Musim angin terutama berlangsung di bulan Juni sampai dengan September. Namun sejak adanya perubahan iklim, musim angin dan musim penghujan menjadi tidak menentu.



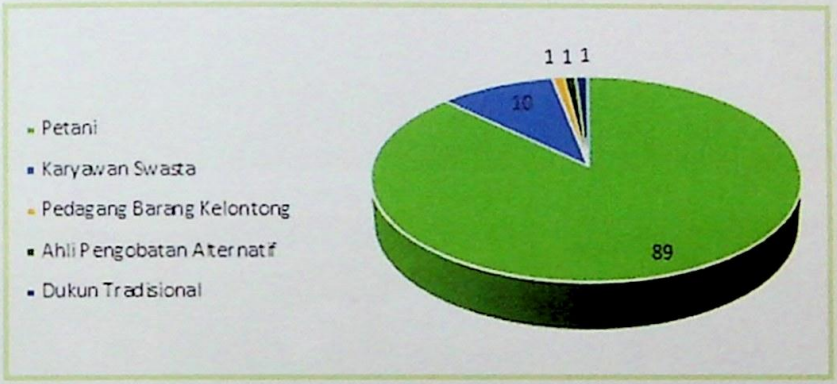
Sumber Daya Manusia

Sebagai bagian dari wilayah kedinasan Sumberklampok, jumlah kepala keluarga (KK) di Banjar Adat Bukit Sari adalah 11,86 % dari total keseluruhan penduduk Desa Sumberklampok yang berjumlah 902 KK (berdasarkan Profil Desa Sumberklampok Tahun 2018).



Jumlah kepala keluarga Banjar Adat Bukit Sari sesuai data kedinasan dan adat berjumlah 107 KK. Namun saat ini 3 KK sudah pindah meninggalkan Banjar Adat Bukit Sari, sehingga jumlah KK per tahun 2019 adalah 104 KK. Namun juga, ada 2 KK yang hanya ber-KTP Banjar Adat Bukit Sar, tetapi tinggal di luar Desa Sumberklampok. Penduduk Banjar Adat Bukit Sari berjumlah 260 orang terdiri dari 106 laki-laki dan 154 perempuan (41:59).

Mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berternak, namun hasil pertanian atau perkebunan sering kali tidak mencukupi kebutuhan selama satu tahun. Para petani biasanya berprofesi ganda menjadi buruh bangunan atau pembudidaya lebah madu.



Budidaya lebah madu dilakukan pada saat tanaman jagung mulai berbunga di bulan Februari - Maret, sehingga jenis madu yang dihasilkan adalah madu bunga jagung. Harga jual madu rata-rata Rp 150.000 per botol 600 ml. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai karyawan swasta, pedagang barang kelontong, ahli pengobatan alternatif, dan dukun tradisional.





Peran dan posisi perempuan sangat penting di tingkat rumah tangga, sosial, adat, dan keagamaan:

- Peran dan fungsi utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dengan segala aktivitas domestiknya, seperti menyiapkan kopi dan sarapan, sembahyang, menyapu, mengantar anak sekolah, memasak, menyiapkan dan memberi makan ternak, dan ke kebun (sementara aktivitas laki-laki adalah mencari pakan ternak, memberi minum ternak, dan bertani)
- Para perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki di bidang pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- Para perempuan ibu Banjar Adat Bukit Sari tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT? Citra Lestari dan organisasi Wanita Hindu Dharma (WHDI) di tingkat banjar. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh KWT adalah Pelatihan Pembuatan Sabun Natural
- *Ngayah* (bekerja sukarela) di pura, banjar, atau di tempat tetangga yang sedang melaksanakan upacara adat/agama

Perlakukan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki sama dan setara, terutama dalam hal pendidikan dan kesempatan bekerja di luar desa.





Kekayaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Kelembagaan Adat dan Agama

Tata kehidupan masyarakat Banjar Adat Bukit Sari mengikuti *awig-awig* Desa Adat Sumberklampok yang terdiri dari empat Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Bukit Sari, Banjar Adat Sumberklampok, Banjar Adat Sumberbatok, dan Banjar Adat Teluk Terima. Terkait dengan kehidupan beragama, masyarakat Banjar Adat Bukit Sari berada di bawah pimpinan seorang Parisada Desa Adat Sumberklampok.

Setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme *sangkep* atau rembug banjar adat. *Sangkep* dilakukan setiap bulan pada hari *anggara kasih*, yang jatuh pada hari Selasa. Peserta rapat adalah para kepala keluarga, baik kelapa keluarga laki-laki maupun perempuan, dan keduanya memiliki hak bersuara dalam pengambilan keputusan yang sama.



Aturan Adat

Tata kehidupan masyarakat Banjar Adat Bukit Sari mengikuti aturan Desa Adat Sumberklampok. Aturan desa adat dibuat dalam bentuk *awig-awig* (tertulis) dan *perarem* (tidak tertulis).

Beberapa *perarem* khusus Banjar Adat Bukit Sari yang harus ditaati adalah:

- Jika ada ternak yang masuk dalam lahan pertanian milik tetangga, si pemilik ternak dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00
- Dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan. Jika ada yang menebang pohon dalam kawasan hutan dikenakan denda sebesar Rp 50.000,00 per pohon
- Jika ada yang tidak hadir dalam kegiatan *ngayah* baik di pura maupun di bale banjar dikenakan denda Rp 10.000,00
- Jika ada yang melakukan perselingkuhan dikenakan denda sebanyak satu kwintal beras, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang berselingkuh





Kepercayaan

Hampir seluruh masyarakat Banjar Adat Bukit Sari beragama Hindu. Dari 102 KK, 2 KK di antaranya beragama Kristen. Ada dua pura didirikan di Banjar Adat Bukit Sari, yaitu:

1. Pura Subak Abian Merta Sari terletak pada lahan seluas 50 are yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat, didirikan pada tahun 2014. Pura Subak Abian ini memiliki tanah *pelaba* (hak komunal) seluas 3,5 ha, di mana hasil dari aneka jenis tanaman yang ada di dalamnya dimanfaatkan untuk kepentingan upacara di pura. Hari *piodalan* Pura Subak Abian Merta Sari dilaksanakan setiap setahun sekali pada *rahina* Perwani Purnama Kadasa (sekitar bulan April).
2. Pura Banjar Bukit Sari, terletak berdampingan dengan Bale Banjar Bukit Sari, didirikan tahun 2002. Pura Banjar ini memiliki tanah *pelaba* seluas 3,5 hektar yang fungsinya sama seperti tanah *pelaba* Pura Subak. Hari *piodalan* Pura Banjar Bukit Sari dilaksanakan setiap setahun sekali pada Purnama Kapat (sekitar bulan Oktober).





Sistem Kemasyarakatan

Masyarakat Banjar Adat Bukit Sari memiliki beberapa *sekaa* (organisasi adat atau seni). Sekaa yang ada di Banjar Adat Bukit Sari adalah:

- Sekaa Santi sebagai organisasi seni *mekidung*
- Sekaa Gong remaja dan anak, biasanya *ngayah megamel* untuk upacara di pura
- Sekaa Suka Duka, semua anggota banjar menjadi anggota dalam *sekaa* ini sebagai wadah bersosialisasi, seperti ketika ada pernikahan dan kematian
- Sekaa Rejang Renteng yang beranggotakan ibu-ibu
- Sekaa Rejang Dewa, beranggotakan anak-anak





Pengobatan Tradisional

Masyarakat Banjar Adat Bukit Sari hingga saat ini masih menjalankan pengobatan tradisional mandiri yang memanfaatkan aneka jenis tanaman, di antaranya:

1. *Loloh* daun *kayu manis* untuk panas dalam. Daun *kayu manis* dicampur dengan air dan diremas-remas, kemudian saring, dan langsung diminum.
2. *Loloh* daun pepaya untuk panas dalam dan malaria. Cara pembuatannya seperti *loloh* daun *kayu manis*.
3. *Loloh gamongan* (sejenis laos) untuk sakit perut. Gamongan dibersihkan kemudian diparut dan diperas, dan langsung diminum.
4. *Babakan* intaran untuk gatal. Tumbuk halus *babakan* (kulit kayu) intaran, gunakan untuk menggosok bagian yang gatal.
5. Daun *kayu urip* dan bawang merah untuk panas dalam. Daun *kayu urip* dan bawang merah ditumbuk halus, kemudian ditempel di perut bagian bawah atau di dahi.
6. Getah jarak untuk lidah putih pada bayi, sariawan, dan luka. Ambil pangkal daun jarak, kemudian teteskan getahnya pada lidah bayi.
7. Daun dapdap tis, garam, dan bawang untuk anak panas. Campur ketiga bahan, remas-remas, kemudian balurkan pada tubuh anak.





Kuliner Lokal

Masyarakat Banjar Adat Banjar Sari adalah masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Bali, sehingga memiliki aneka jenis kuliner, di antaranya:

- Nasi jagung dan nasi *sela*. Beras dicampur dengan jagung atau singkong, dimasak bersamaan.
- *Lawar getih*. Dibuat dari darah ayam atau babi, dicampur dengan kelapa parut dan bumbu lainnya.
- *Jukut undis, jukut komak, jukut kelor*. Sayur berkuah dengan bumbu rajang yang biasanya dicampur dengan kacang undis, kacang komak, atau daun kelor.
- Sate lilit dan sate *pusuh*. Sate lilit dibuat dari daging cincang, sementara satu *pusuh* adalah potongan daging.
- *Urutan*. Usus babi yang diisi potongan daging kecil-kecil dengan campuran bumbu.
- *Tum slempet* dan *tum* lamtoro. Bahan utama dan bumbu dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
- Pepes/*brenkes*. Hampir sama seperti, tetapi bukan dikukus melainkan dipanggang.





Pertanian Lahan Kering

Petani Bukit Sari mengembangkan pertanian lahan kering dengan sistem pertanian tumpang sari. Musim tanam biasanya dilakukan pada bulan Desember pada puncak musim penghujan.

Jenis tanaman pertanian yang dikembangkan di antaranya:

- Jagung, terdiri dari jagung ketan (jenis lokal dan hibrida), jagung hibrida lainnya, jagung *gimbal* (untuk pakan ternak). Jagung rata-rata berusia tiga bulan dan sudah siap panen.
- Ketela pohon, usia tiga bulan sudah siap panen. Ketela pohon tidak hanya ditanaman di pekarangan, melainkan juga di halaman rumah sebagai pagar pembatas.
- Kacang-kacangan yang terdiri dari buncis, *gude* atau undis, kacang merah (kacang jongkok/tolo/kacang dapdap), dan kacang panjang. Jenis kacang-kacangan, kecuali undis berumur tiga bulan. Undis dipanen pada bulan kelima atau keenam, bersamaan dengan panen cabai.
- Aneka jenis sayuran seperti cabai, terong ungu, terong bulat, bayam, dan kangkung. Rata-rata berusia 2-3 bulan, dan bisa ditanam terus-menerus tergantung ketersediaan air.

Petani Bukit Sari juga mengembangkan komoditi buah-buah, terutama jeruk jenis kintamani dan tejakula. Sejak ditanam, minimal tiga tahun kemudian baru bisa menghasilkan. Butuh waktu sembilan bulan untuk bisa dipanen sejak pohon jeruk mengeluarkan bunganya.

Warung/Toko Kelontong dan Bengkel

Untuk memenuhi kebutuhan harian, masyarakat Banjar Adat Bukit Sari ada yang membuka usaha warung dan toko kelontong. Ada lima warung/toko kelontong yang menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya di Banjar Adat Bukit Sari. Selain itu juga ada satu bengkel sepeda dan sepeda motor yang juga bisa melayani servis mobil.



Sabun Natural

Sejak Agustus 2019, Kelompok Wanita Tani Banjar Adat Bukit Sari membuat sendiri sabun mandi untuk kebutuhan harian. Bahan utama sabun adalah minyak kelapa yang biasa dibuat sendiri. Sabun natural yang dibuat juga memanfaatkan aneka jenis tanaman yang ada lainnya, seperti pepaya, kelor, cempaka, kenanga, soka, dan kunyit.




LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(L P D)
DESA ADAT SUMBERKLAMPOK
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN
GILIMANUK-SINGARAJA.


KSU KOPERASI SERBA USAHA
WANA AGUNG.
KOPERASI INDONESIA
DS. SUMBERKLAMPOK, KEC. GEROKGAK-BULELENG.
BH No:15/BH/DISKOP/XII/2002.
JLn. SINGARAJA-GILIMANUK ..

Lembaga Keuangan

Khusus di Banjar Adat Bukit Sari tidak terdapat lembaga keuangan desa. Lembaga keuangan desa ada di wilayah Desa Sumberklampok yang lain, yaitu di Banjar Sumberbatok. Lembaga keuangan yang ada di Desa Sumberklampok adalah Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Wana Agung.

LPDA didirikan oleh *krama* Desa Adat Sumberklampok yang ditujukan sebagai usaha simpan pinjam untuk melayani masyarakat adat. Namun pada kenyataannya LPDA juga memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bukan berstatus sebagai *krama* adat.

KSU Wana Agung adalah lembaga keuangan mikro yang dibangun oleh beberapa anggota masyarakat Desa Sumberklampok. Koperasi ini memberikan pelayanan khususnya kepada anggota dan juga masyarakat lain di luar anggota. Saat ini KSU Wana Agung memiliki lebih dari 500 anggota.




SEKTARIAT
BALAI GUBAK MENTA GARI

Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Permukiman dan Bale Banjar

Struktur perumahan penduduk di Banjar Adat Bukit Sari, terpusat pada satu kawasan pemukiman, dengan konstruksi kombinasi dalam bentuk semi permanen dan permanen. Material bangunan yang digunakan berupa pasir, batu karang dan batu hitam, batako, serta semen untuk bagian dinding. Sementara untuk atap menggunakan tiga jenis material pilihan berupa genteng, asbes, dan spandek.

Sebagai sebuah komunitas adat, masyarakat Bukit Sari memiliki fasilitas umum sebagai tempat pertemuan dan pusat kegiatan, yaitu Bale Banjar Bukit Sari. Bale banjar didirikan pada tahun 2013 dengan modal swadaya dan bantuan dari pemerintah.



Sekolah/Lembaga Pendidikan dan Kesehatan

Banjar Adat Bukit Sari tidak memiliki fasilitas umum untuk pendidikan, kesehatan, dan pasar. Di sebelah barat wilayah Banjar Adat Bukit Sari terdapat SDN 1 Sumberklampok, tepatnya terletak di Banjar Dinas Tegal Bunder.

Kegiatan kesehatan rutin dilakukan sebulan sekali oleh Puskesmas Pembantu Desa Sumberklampok di Bale Banjar Bukit Sari. Kegiatan dilakukan pada setiap tanggal 12, yaitu Posyandu (Pos Pelayangan Terpadu) dan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis).

Jalan, Komunikasi, dan Listik

Akses menuju Banjar Adat Bukit Sari sangat mudah dan bagus karena terletak di pinggir jalan provinsi, yaitu Jalan Raya Gilimanuk - Singaraja. Jarak dari Pelabuhan Gilimanuk hanya sekitar 10 km yang dapat dicapai dalam waktu 15 menit.

Komunikasi menggunakan telepon genggam mulai masuk pada tahun 2005. Saat ini provider yang bisa ditangkap adalah Simpati dan XL di seluruh wilayah Banjar Adat Bukit Sari.



Sebagai sebuah banjar yang masuk ke dalam wilayah desa yang sudah berdiri sejak tahun 2002, fasilitas penerangan menggunakan listrik PLN juga langsung tersedia, bahkan ketika rumah yang didirikan masih semipermanen. Ketersediaan listrik di setiap rumah diajukan secara swadaya. Untuk keluarga kurang mampu, listrik baru tersedia pada tahun 2013 atas bantuan PLN. Ironisnya, posisi permukiman (dan tegalan) Banjar Adat Bukit Sari terletak dalam wilayah jaringan listrik Jawa-Bali. Ada dua kapasitas tegangan, yaitu SUTET 500 kv (ke arah Negara) dan SUTT 150 kv (ke arah Singaraja).







Pengelolaan Limbah Padat dan Cair

Dalam hal pengelolaan sampah, masyarakat Bukit Sari belum melakukannya. Semua sampah, baik daun maupun plastik, juga jenis sampah lainnya langsung dibuang ke kebun, kemudian dibakar. Kecuali untuk sisa makanan, biasanya diberikan untuk pakan ternak.

Demikian halnya dengan pengelolaan limbah cair. Belum ada sistem pengelolaan limbah cair di Banjar Adat Bukit Sari, namun masyarakat memanfaatkan sebagian air limbah dapur juga untuk pakan ternak. Sebagiannya lagi dibuang langsung ke tegalan, termasuk juga air limbah kamar mandi.



Menghadapi Tantangan Kini dan Nanti

Tantangan terbesar masyarakat Banjar Adat Bukit Sari adalah lokasi permukiman dan perkebunan yang berada di sekitar wiayah SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18/2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Kapasitas Tegangan (kv)	Jenis	A (m)	B (m)
SUTT 66 kv	Tiang baja	4	4,5
SUTT 66 kv	Tiang beton	4	4,5
SUTT 66 kv	Menara	7	4,5
SUTT 150 kv	Tiang baja	6	5
SUTT 150 kv	Tiang beton	5	5
SUTT 150 kv	Menara	10	5
SUTET 275 kv	Sirkuit ganda	13	7
SUTET 500 kv	Sirkuit tunggal	22	9
SUTET 500 kv	Sirkuit ganda	17	9
SUTTAS 250 kv		14	6
SUTTAS 500 kv		18	9

Keterangan:

A) Jarak bebas minimum horisontal

B) Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk bangunan

Ada beberapa cara untuk mengurangi dampak paparan SUTET, yaitu di antaranya (*https://www.99.co/id/panduan/fakta-mitos-rumah-dibawah-sutet*):

1. Menghindari material logam
   Logam merupakan material penghantar listrik, jadi hindari pemakaian atap dan juga jemuran bermaterial logam. Sebaliknya gunakan genteng keramik, PVC, bitumen atau sirap sebagai atap rumah. Jemuran menggunakan tali atau kayu. Jika tidak, letakkan jemuran di bawah pohon untuk mereduksi risiko medan listrik. Rumah harus memiliki plafon untuk mengurangi dampak radiasi elektromagnetik.
2. Melakukan penghijauan
   Perbanyak tanaman hijau di sekitar rumah untuk mengurangi risiko radiasi gelombang elektromagnetik. Namun perlu diperhatikan ketinggian dan batas-batas ruang bebas dalam menanam pohon. Puncak pohon haruslah berjarak minimum 15 meter dari kabel SUTET terbawah.
3. Menghindari beraktivitas di luar rumah pada malam hari
   Hal tersebut dikarenakan pada saat malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTET lebih tinggi daripada siang hari.

Masyarakat yang tinggal di sekitar SUTET cenderung mengalami ancaman bahaya, di antaranya luka bakar bila terjadi loncatan listrik, gangguan metabolisme tubuh, gangguan saraf, dan irama detak jantung yang tidak teratur. Ada cara sederhana untuk mengetahui berbahaya tidaknya satu daerah, yaitu dengan menggunakan pesawat radio atau televisi. Apabila perangkat elektronik tidak mengalami gangguan penerimaan, maka daerah tersebut relatif aman dari pengaruh medan magnet/listrik.

Sebagai satu wilayah yang berada dalam radius SUTT dan SUTET, Banjar Adat Bukit Sari perlu memperhatikan "Ruang Bebas dan Jarak Bebas (horisontal dan vertikal)" seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 2/2019. Hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan penghijauan untuk mengurangi risiko radiasi gelombang elektromagnetik.

Selain SUTET, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial, menghadapi anak-anak dan anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gawai. Bukan hanya itu, ada juga yang sering kebut-kebutan dan mabuk-mabukan. Sehingga perlu dipikirkan dan direncanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk generasi muda.

Tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Banjar Adat Bukit Sari adalah status kepemilikan lahan. Hingga saat ini setiap kepala keluarga belum mendapatkan kepastian hukum kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah. Namun disadari juga, ketika sertifikat sudah didapatkan ada kemungkinan akan terjadi alih kepemilikan lahan - seperti kondisi pada umumnya yang terjadi di Bali.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap kepala keluarga Banjar Adat Bukit Sari pada bulan April 2018 telah membuat Surat Pernyataan. Bahwa apabila pemerintah memberikan kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap KK tidak akan memindahtangankan/menjual kepada pihak lain, kecuali kepada keturunan/ahli waris sebagai pewaris yang sah.

Satu hal yang juga perlu diatur adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan. Kondisi ini sudah banyak terjadi di Bali, walaupun belum terjadi di Bukit Sari. Sehingga ke depan perlu disusun rencana kelola ruang banjar dan aturan pengelolaan ruang Banjar Adat Bukit Sari.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Ketut Ade
Nomor KTP.	: 5108012003630000
Tempat/Tgl. Lahir	: Buleleng, 20-02-1963
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Alamat	: Banjar Dinas Tegal Bunder
Desa	: Sumberklampok
Kecamatan	: Gerokgak
Kabupaten	: Buleleng

Dengan ini menyatakan yang sebenar benarnya bahwa ;

1. Memang benar kami telah menempati tanah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, untuk lahan pekarangan/pemukiman seluas 400 M2 dan lahan pertanian seluas 5000 M2 sejak tahun 2000 sampai sekarang.
2. Tanah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sumberklampok, yang telah kami tempati dan garap, apabila permerintah memberikan kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku maka kami tidak akan memindahtangankan/menjual kepada pihak lain, kecuali memberikan/memindahtangankan kepada keturunan/ahli waris kami sebagai pewaris yang sah.
3. Kami berjanji, tanah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sumberklampok, yang kami tempati sebagai pemukiman dan kami garap/kelola untuk lahan pertanian apabila diberikan oleh pemerintah secara legal/resmi, kami akan tempati dan garap secara turun temurun.
4. Kami tidak akan memperluas lahan garapan secara ilegal dan menjadi mitra pengelola kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan turut menjaga dengan baik kawasan hutan di sekitarnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kami melanggar surat pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut oleh pihak yang berwajib di depan peradilan.

Sumberklampok, 10 April 2018

Mengetahui
Perbekel Sumberklampok

Yang membuat pernyataan

PERBEKEL SUMBERKLAMPOK

METERAI TEMPEL 6000

(I Wayan Sawitra Yasa)

(Ketut Ade)